

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

KURTANI (Kredit Usaha Rakyat Tani) adalah bagian dari kartu tani yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang anggarannya menggunakan APBN. Secara umum kartu tani merupakan alat untuk membantu petani dalam menjalankan kegiatannya, seperti untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan pupuk, hingga pengumpulan hasil panen serta penyerapan oleh Bulog. Selain itu, perbankan akan memberikan kredit kepada petani yang memiliki kartu tani untuk melakukan penanaman bibit dan secara bersamaan mendapatkan data waktu panen dan kebutuhan agar dapat diserap oleh Bulog.

Masalah Kartu Tani diarahkan melalui sebuah sistem *online* dan pergerakannya bisa di ketahui secara '*real time*' maka dengan sistem ini pemerintah akan dapat memantau hasil produksi petani serta distribusi pupuk serta bibit. Dalam program kartu Tani tidak hanya membutuhkan perangkat lunak tapi juga petugas yang bertugas memasukan data pada perangkat komputer. Data setiap petani akan di data dan kemudian di input oleh petugas di desa atau kelurahan dan di rekapitulasi oleh petugas kecamatan. Oleh karena itu setiap kartu

tani yang akan di berikan ke petani terdapat 'chip' yang berisi data petani seperti identitas pribadi, luas lahan, bibit, pupuk, dan hasil produksi panen.

KURTANI pertama kali di keluarkan pada tahun 2017 oleh pemerintah dimana program ini merupakan program langsung dari pemerintah pusat, KURTANI ini bertujuan untuk mensejahterakan kaum petani dan juga membantu menaikkan produksi hasil pertanian karena melalui kartu tani ini para petani bisa membeli pupuk bersubsidi dengan harga murah sesuai dengan garapan sawah juga bisa meminjam dana untuk penggarapan sawah ataupun untuk membuka usaha. Dengan adanya kartu tani di harapkan akan mempermudah petani untuk bertransaksi baik itu bertransaksi membeli pupuk subsidi, meminjam dana KURTANI, atau untuk penjualan hasil panen yang akan di serap oleh Bulog.

Program pemerintah ini yaitu berupa pemberian kartu debit atau kartu tani ke setiap keluarga yang memiliki atau mengelola sawah banyak termasuk yang *Nengah* (menggarap sawah milik orang lain). Setiap keluarga yang mempunyai sawah dan berprofesi sebagai petani atau sedang menggarap sawah orang lain pun di data oleh ketua RT dan kelompok tani masing masing-masing yang ada di RW mereka untuk pemberkasaan dan pendataan yang nantinya akan menjadi persyaratan pembuatan kartu debit KURTANI dan kartu tani. Setiap para petani yang ingin mendapatkan kartu tani ini harus mengajukan surat permohonan yang harus di tanda tangan oleh ketua GAPOKTAN atau Kelompok Tani atau UPT, membuat surat SKU (Surat Keterangan Usaha) yang menyatakan bahwa penerima merupakan asli petani, mengisi formulir, pelaksanaan survei yang di lakukan oleh

pihak BNI, menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan harus di di cocokan dengan aslinya, dan Fotocopy atau kartu identitas tersebut harus di beri paraf oleh Account Officer (AO) atau kepala unit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah dan fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya, tahap dokumen kredit cukup di lakukan di bawah tangan, tidak perlu di legalisasi.

Program KURTANI diadakan pemerintah setahun terakhir ini tetapi di duga belum dimanfaatkan semaksimal mungkin karena banyak para petani yang belum memahami manfaat, kegunaan, dan cara menggunakan KURTANI ini sehingga para petani hanya menyimpan kartu ini dan belum menggunakannya, selain itu program ini di duga belum efektif karena para petani masih harus membeli pupuk untuk menggarap sawah dengan cara membeli pupuk eceran kepada tengkulak atau pengepul karena masih banyak KPL (Kios Pupuk Lengkap) yang belum menyediakan alat untuk “mengesek” kartu tani ini sehingga belum bisa bertransaksi melalui kartu tani. Selain kartu tani belum bisa digunakan masyarakat petani pun belum memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat Tani in karen para petani di duga tidak ingin terlilit hutang meskipun dengan bunga relatif rendah. Proses pembayaran KURTANI ini dianggap memberatkan petani dan tidak pro petani kecil karena proses pembayaran harus di lakukan dengan jarak 6 bulan (ketika musim panen datang) sedangkan hasil panen petani tidak menentu kadang turun menurun sehingga para petani khawatir jika mereka meminjam dana KURTANI dan hasil panen mereka menurun mereka tidak bisa melunasi

pinjaman dana KURTANI ini sehingga harus menerima sanksi tidak boleh menggunakan KURTANI ini dengan jarak 1 tahun.

Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak BNI pun bisa di bilang sangat kurang karena pihak BNI memberikan penyuluhan dengan sosialisasi hanya melalui perantara Kelompok Tani atau GAPOKTAN sehingga penyampaian kembali pesan dari Kelompok Tani terhadap petani ini kurang maksimal dan tidak utuh sehingga menyebabkan petani kurang memahami cara menggunakan kartu tani, cara meminjam dana KURTANI, dan mekanisme KURTANI. Selain itu, petani di daerah khususnya di kampung Pojok selalu menginginkan hal-hal yang instan dari pemerintah yang membuat mereka mudah menjangkaunya dan cepat pula uruannya. Misalnya, ketika petani membutuhkan pupuk, pupuk ada dan bisa langsung di beli, demikian juga komoditas lainnya. Penyebab penggunaan kartu tani yang di duga belum efektif adalah karena masyarakat petani di kampung Pojok banyak yang tidak memahami cara penggunaan kartu tani ini dan menganggap penggunaan kartu ini ribet karena harus sistem “menggesek” terlebih para petani di kampung Pojok bermayoritas berpendidikan rendah sehingga mereka tidak mengenal budaya “menggesek” sedangkan untuk dapat membeli pupuk bersubsidi lewat kartu ini para petani harus mengisi saldo di Bank BNI yang tercatat di kartu tani ini untuk membeli pupuk ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di kecamatan Kadungora setelah itu kartu di “gesekkan” ke alat transaksi, Elektronik Data Capture (EDC) milik bank BNI, dan harus menekan nomor PIN (*Personal Identity Number*) yang telah di berikan. Sedangkan kebanyakan mayoritas petani di kampung Pojok tidak memahami mekanisme

penggunaan kartu ini dan KPL di daerah kecamatan kadungora pun belum banyak yang menyediakan alat untuk menggesek kartu tani ini sehingga banyak para petani yang tetap membeli pupuk ke tengkulak.

Banyak masyarakat kampung Pojok yang mayoritas berprofesi sebagai petani menyayangkan kebijakan ini yang di duga belum efektif karena seharusnya dengan adanya program ini masyarakat bisa lebih sejahtera dan juga pembangunan dalam hal pertanian bisa lebih di tingkatkan karena kemudahan yang di awarkan dalam kartu ini sangata banyak salah satunya bisa meminjam dana penggarapa sawah dan modal usaha namun sayang kurangnya penyuluha dan sosialisasi yang di lakukan pemerintah dan pihak BNI menyebabkan para petani kurang memahami manfaat dan kegunaan kartu ini shingga masih banyak sekali petani yang belum memanfaatkan kartu ini bahkan mesia-siakan.

Berangkat dari realitas kondisi di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang efektif atau tidaknya kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah yaitu berupa program pemberian kartu tani untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada setiap keluarga para petani yang mengelola sawah banyak di Kampung Pojok tersebut, yang penulis tuangkan dalam judul: **“Study Tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tani (KURTANI) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani (Penelitian di Kampung Pojok Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut).”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan pemerintah mengenai pembagian kartu tani yang diberikan pemerintah kepada setiap kepala keluarga petani yang ada di Desa Cikembulan.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan di bidang pertanian khususnya di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
3. Relasi kuasa pemerintah terhadap masyarakat Desa Cikembulan mengenai kebijakan pemberian kartu tani kepada setiap keluarga petani.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian KURTANI di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam pemanfaatan KURTANI?
3. Bagaimana hasil program KURTANI dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Ciembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemerintah dalam memberikan Kartu Tani di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial pemerintah dan masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam menentukan kebijakan.
3. Untuk mengetahui hasil program KURTANI dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ciembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu sosiologi, khususnya berkaitan dengan sosiologi pembangunan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat mengenai Study tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tani (KURTANI) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani (Penelitian di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut)

2. Bagi Mahasiswa

Memberikan masukan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Sosiologi pembangunan yang diharapkan dapat menjadi tambahan pembendaharaan ilmu pengetahuan terutama mengenai Study tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tani (KURTANI) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani (Penelitian di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut)

1.6. Kerangka Pemikiran

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertumbuhan manusia. Produksi/hasil pertanian dalam arti luas tergantung dari faktor genetik/varietas yang ditanam, lingkungan termasuk antara lain tanah,

iklim dan teknologi yang dipakai. Sedangkan dalam arti sempit terdiri dari varitas tanaman, tanah, iklim, dan faktor-faktor non teknis seperti keterampilan petani, biaya/sarana produksi pertanian dan alat-alat yang digunakan.¹

Upaya mengevaluasi jalannya suatu program atau kebijakan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap program atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah atau tetap mempertahankan tetapi dengan memberikan solusi terbaik terkhusus dalam penyuluhan cara penggunaan atau pun akses jalan maupun fasilitas yang memadai kebijakan kartu tani ini. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan atau program melalui mengembangkan pembangunan pertanian dalam hal pemberian kartu rekening. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Untuk membuat kebijakan atau program yang di buat pemerintah terhadap pembangunan petani di kampung pojok efektif seharusnya pemerintah membangun hubungan atau interaksi sosial lebih dalam dengan masyarakat yaitu dengan cara menanyakan ataupun menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat kampung pojok khususnya masalah mengenai ketidakfahaman masyarakat terhadap teknologi maupun fasilitas yang memadai.

¹ Soleh, Solahudin. *Visi Pembangunan Pertanian Abad 21*. Bogor: Humas IPB. 1999. Hlm. 40

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling bertegur, menjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringet, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semuanya itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang kemudian menentukan tindakan apa yang dilakukannya.²

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Suatu contoh dapat dikemukakan dari Perang Dunia Kedua yang lalu sebagaimana dilukiskan oleh Gillin dan Gillin. Pada tanggal 7 Desember 1939, patroli Prancis telah berhasil menawan tiga orang prajurit Jerman. Salah seorang tawanan menderita luka-luka pada tangannya sewaktu terjadi pertempuran. Para tawanan dibawa ke garis belakang. Di tempat yang agak terang, tawanan luka-luka dan prajurit Prancis yang telah menembaknya saling mengenal dan saling memeluk. Ternyata sebelum perang, keduanya adalah

² Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT RAJAGRAPINDO PERSADA). 2013. Hlm. 55

sahabat yang selalu bersaing pada setiap perlombaan balap sepeda bayaran. Mereka bukan musuh secara pribadi, tetapi kelompoknya masing-masing (yaitu negara Jerman dan Prancis) yang bermusuhan. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok sosial tidak bersifat pribadi.³

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:⁴

1. adanya kontak sosial (*social-contact*);
2. adanya komunikasi,

Hubungan atau interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat terutama mengenai masalah program kebijakan pemerintah mengenai kartu tani untuk pembelian pupuk bersubsidi akan sangat berdampak positif kepada dua belah pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat, dimana disini pemerintah tercapai visi misinya untuk mengembangkan pembangunan di bidang pertanian masyarakat Kampung Pojok sedangkan masyarakat sendiri terpenuhi kesejahterannya terkhusus dalam pembangunan di bidang pertanian karena semuanya akan mudah jika program KURTANI ini berjalan dengan baik dan efisien, efektif dijalankan masyarakat terlebih didukung oleh fasilitas yang memadai dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah mengenai cara penggunaan KURTANI untuk membeli pupuk bersubsidi atau untuk meminjam dana usaha atau penggarapan sawah..

³ *ibid.* Hlm. 56

⁴ *ibid.* Hlm. 58

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia, misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun masyarakat.⁵

Pembangunan adalah proses historikal. Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti.⁶

Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengaruh segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari.

⁵ *Ibid.* Hlm. 360

⁶ Adon Nasrullah Jamaluddin. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2016. Hlm. 5

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengaahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, sertapembangunan bangsa.

Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan perdaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Proses pembanguan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual, maupun material. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut.⁷

- a. pembangunan harus bersifat rasionalitas; artinya, haluan yang diambil harus dilandaskan pada pertimbangan rasional. Haluan itu hendaknya didasarkan pada fakta sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang sinkron.

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 360-361

- b. Adanya rencana pemangunan dan proses pembangunan, artinya adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional, dalam sautu sistem
- c. Peningkatan produktifitas
- d. Peningktan standar kehidupan
- e. Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan sama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum
- f. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat. Sikap-sikap tersebut mencakup:
 - 1. Efisiensi
 - 2. Kerajinan dan ketekunan
 - 3. Keteraturan
 - 4. Ketetapan
 - 5. Kesederhanaan dan kecermatan
 - 6. Ketelitian dan kejujuran
 - 7. Bersifat rasional dalam mengambil keputusan
 - 8. Selalu siap untuk menghadapi berbagai perubahan

Gambar 1.1

Skema Kerangka Teori

